

POHON KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



S0
Menteri Dalam Negeri (outcome)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
Indeks kepuasan publik atas layanan SPM dan Yandas (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar)

S1
Ditjen Bina Pembangunan Daerah (outcome)

Meningkatnya jumlah daerah yang menerapkan SPM dan NSPK dalam pemenuhan layanan dasar (yandas) publik
% Daerah yang menerapkan SPM dan NSPK dalam memenuhi yandas publik

Meningkatnya jumlah daerah yang menerapkan NSPK dalam memenuhi layanan publik non yandas
% Daerah yang menerapkan NSPK dalam memenuhi layanan publik non yandas

S2
Direktorat (intermediate outcome)

Meningkatnya jumlah daerah yang menginternalisasi SPM dan NSPK yandas ke dalam dokrenda
% Daerah yang tagging indikator SPM dan NSPK yandas dalam aplikasi dokrenda

Meningkatnya jumlah daerah yang konsisten dalam melaksanakan pelayanan dasar berdasarkan dokrenda
% Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan terkait yandas

Meningkatnya jumlah daerah yang menginternalisasi NSPK non yandas ke dalam dokrenda
% Daerah yang tagging indikator NSPK non yandas dalam aplikasi dokrenda

Meningkatnya jumlah daerah yang konsisten dalam melaksanakan pelayanan non dasar berdasarkan dokrenda
% Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan terkait nonyandas

S3
Sub Direktorat (intermediate outcome)

Meningkatnya pemahaman aparatur Pemda dalam menterjemahkan indikator SPM dan NSPK yandas publik dalam bentuk program dan kegiatan
% Kesesuaian program dan kegiatan daerah dengan indikator SPM dan NSPK yandas publik

Semakin mudahnya Pemerintah Daerah dalam menyusun dokrenda berbasis elektronik
1. Tersedianya aplikasi dokrenda
2. Indeks kepuasan user/pengguna aplikasi di daerah

Meningkatnya harmonisasi antar Pemda dan antar level pemerintahan dalam penerapan SPM dan NSPK dalam pemenuhan yandas publik
1. % Target pembangunan nasional terkait yandas yang tagging pemerintah daerah dalam penyusunan dokrenda
2. % Penyelesaian permasalahan antar Pemda dan antar level pemerintahan dalam perencanaan dan penerapan SPM, dan NSPK yandas
3. % Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan daerah dalam rangka penerapan SPM dan NSPK dalam pemenuhan yandas

Meningkatnya pemahaman aparatur Pemda dalam menterjemahkan indikator NSPK non yandas dalam bentuk program dan kegiatan
% Kesesuaian program dan kegiatan daerah dengan indikator NSPK non yandas

Semakin mudahnya Pemerintah Daerah dalam menyusun dokrenda berbasis elektronik
1. Tersedianya aplikasi dokrenda
2. Indeks kepuasan user/pengguna aplikasi di daerah

Meningkatnya harmonisasi antar level pemerintahan dalam perencanaan penerapan NSPK dalam pemenuhan pelayanan publik non yandas
1. % Target pembangunan nasional terkait non yandas yang tagging pemerintah daerah dalam penyusunan dokrenda
2. % Penyelesaian permasalahan antar Pemda dan antar level pemerintahan dalam perencanaan dan penerapan NSPK non yandas
3. % Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan daerah dalam rangka penerapan NSPK non yandas

S4
Eselon IV (Output)

Efektifitas fasilitasi, asistensi, dan supervisi Ditjen Bina Bangda kepada Pemerintah Daerah
% Daerah yang mendapatkan fasilitasi, asistensi, dan supervisi dalam rangka menterjemahkan indikator SPM dan NSPK yandas publik

Efektifitas fasilitasi, asistensi, dan supervisi Ditjen Bina Bangda kepada Pemerintah Daerah
% Daerah yang mendapatkan fasilitasi, asistensi, dan supervisi dalam rangka penyusunan dokrenda berbasis elektronik

Efektifitas fasilitasi, asistensi, dan supervisi Ditjen Bina Bangda kepada Pemerintah Daerah
1. % Daerah yang mendapatkan fasilitasi, asistensi, dan supervisi dalam rangka proses tagging prioritas nasional yang terkait yandas dalam dokrenda
2. % Daerah yang mendapatkan fasilitasi, asistensi, dan supervisi dalam penyelesaian permasalahan antar Pemda dan antar level pemerintahan yang terkait yandas
3. % Daerah yang dievaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penerapan SPM dan NSPK dalam pemenuhan yandas

Efektifitas fasilitasi, asistensi, dan supervisi Ditjen Bina Bangda kepada Pemerintah Daerah
% Daerah yang mendapatkan fasilitasi, asistensi, dan supervisi dalam rangka menterjemahkan indikator NSPK non yandas publik

Efektifitas fasilitasi, asistensi, dan supervisi Ditjen Bina Bangda kepada Pemerintah Daerah
% Daerah yang mendapatkan fasilitasi, asistensi, dan supervisi dalam rangka penyusunan dokrenda berbasis elektronik

Efektifitas fasilitasi, asistensi, dan supervisi Ditjen Bina Bangda kepada Pemerintah Daerah
1. % Daerah yang mendapatkan fasilitasi, asistensi, dan supervisi dalam rangka proses tagging prioritas nasional yang terkait non yandas dalam dokrenda
2. % Daerah yang mendapatkan fasilitasi, asistensi, dan supervisi dalam penyelesaian permasalahan antar Pemda dan antar level pemerintahan yang terkait non yandas
3. % Daerah yang dievaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penerapan NSPK non yandas

Meningkatnya kualitas manajemen dan dukungan teknis Ditjen Bina Bangda
1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Persentase pengelolaan keuangan (anggaran) yang bebas dari temuan yang material
4. Kepuasan pegawai atas layanan pengelolaan SDM aparatur
5. Kepuasan pegawai atas layanan penyediaan sarana dan prasarana kerja

Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM aparatur

Meningkatnya kualitas dan sinergi perencanaan dan penganggaran lintas Direktorat

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan

Meningkatnya kualitas regulasi dan advokasi pelaksanaan urusan pemerintahan

Meningkatnya kualitas penyediaan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan BMN

Sekretariat (input)

Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Ir. Diah Indrajati, M.Sc.